

# **STRENGTHS-PERSPECTIVE SEBAGAI PENGUATAN DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

## **STRENGTHS-PERSPECTIVE AS AN AFFIRMATION TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL POLICY FOR POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA**

**Marcelino Vincentius Poluakan**

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

**E-mail** : marcelinopoluakan86@gmail.com

**Santoso Tri Raharjo**

Pusat Studi *Corporate Social Responsibility*, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

**E-mail**: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

**Nunung Nurwati**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

**E-mail**: nngnurwati@yahoo.co.idm

### **Abstrak**

*Strengths-Perspective* merupakan salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah sosial. Pada awalnya, pendekatan ini diterapkan dalam intervensi pekerjaan sosial klinis baik terhadap individu, keluarga maupun komunitas. Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai diterapkan dalam pengembangan kebijakan sosial di berbagai area salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Penggunaan pendekatan ini merupakan upaya untuk memperkaya dan memperkuat pendekatan yang selama ini telah digunakan seperti pendekatan *Problem-Based*. Tulisan ini akan mengkaji pengertian dari *Strengths-Perspective* serta mengidentifikasi dan mendiskusikan karakteristik *Strengths-Perspective* dan bagaimana *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur seperti buku, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang kredibel serta mendukung argumentasi yang ingin dibangun oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan pendekatan *Strengths-Perspective* dapat memperkuat pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia karena pendekatan ini memberikan beberapa penguatan dalam beberapa aspek pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memberikan cara pandang baru bagi stakeholder kebijakan pengentasan kemiskinan tentang orang miskin, masalah sosial kemiskinan serta kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, *Strengths-Perspective* dapat memperkuat *outcome* yang diharapkan oleh masyarakat miskin melalui kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci:** *strengths-perspective*, kebijakan sosial, pengembangan kebijakan sosial.

### **Abstract**

*Strengths-Perspective* is one of the approaches in social work that focuses on the strengths, potential and resources possessed by people with social problems. Initially, this approach was applied in clinical social

*work intervention for individuals, families and communities. In its development, this approach has been started to be applied in the development of social policies in various areas, such as: poverty alleviation. This approach is an attempt to enrich and strengthen the other approach that has been used, such as: the problem-based approach. This paper will examine the definition of Strengths-Perspective, identify and discuss the characteristics of Strengths-Perspective and brief how Strengths-Perspectives can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia. The method used is study of literature, such as: books, articles, and other scientific writings that are credible and supportive for the argument that the author wants to develop. The results of the study show that the Strengths-Perspective approach can strengthen the development of social policies for poverty alleviation in Indonesia because this approach provides some reinforcement in several aspects of social policies to handle poverty. This approach provides a new perspective for poverty alleviation policy stakeholders about the poor, social problems of poverty and poverty alleviation policies. In addition, Strengths-Perspective can strengthen the outcomes expected by the poor through poverty alleviation social policies.*

**Keywords:** *strengths-perspective, social policy, social policy development.*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan sosial terkait dengan strategi atau upaya pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan keberfungsian sosial semua kelompok yang ada di masyarakat (Midgley, et al 2000; Zastrow, 2017). Kebijakan sosial juga berfokus pada permasalahan kesejahteraan sosial dan bagaimana mengatasinya (Walsh et al., 2000). Selain itu, kebijakan sosial berupaya mengatasi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan manusia (Spicker, 2014).

Pentingnya posisi dan peran dari suatu kebijakan sosial dalam suatu negara mengharuskan sebuah kebijakan sosial dikembangkan secara tepat dan efektif. Kebijakan sosial yang efektif adalah yang mampu menjawab persoalan atau permasalahan sosial selain menciptakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhirnya. Kebijakan sosial yang efektif memberi dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Islammy dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan sosial yang efektif disusun berdasarkan definisi dan analisis masalah sosial yang tepat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat (Chambers & Wedel, 2005)

Mencapai sebuah kebijakan sosial yang efektif dan tepat sasaran, setiap tahapan dalam pengembangan kebijakan harus dilaksanakan dengan baik. Tahap-tahap tersebut meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan usulan dan legitimasi kebijakan (Winarno, 2012). Selain pelaksanaan tahap-tahap tersebut, pengembangan kebijakan sosial juga harus menggali kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan. Kebijakan sosial harus dapat mendayagunakan serta memperkuat kekuatan, potensi serta sumber daya tersebut.

Salah satu area kebijakan sosial di Indonesia adalah pengentasan kemiskinan. Tujuan utama kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun berbagai upaya pengentasan kemiskinan lewat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 1 menyebutkan bahwa upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial.

Berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan terus berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia dari dua digit menjadi satu digit pada dekade terakhir (BPS, 2020). Perbaikan juga dapat terlihat dalam peningkatan program-program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial baik dari sisi alokasi anggaran maupun jumlah penerima program.

Pelaksanaan program-program tersebut dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia memang sudah berjalan baik. Namun, kita tidak dapat hanya berhenti pada pelaksanaannya tanpa melihat hasil atau pencapaian *outcome* dari setiap program tersebut untuk jangka panjang. Kenyataannya, makin beragamnya program pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial di Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu contoh kebijakan sosial pengentasan kemiskinan yang masih perlu diperkuat agar memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap sarasannya. Program pemberdayaan yang lebih bernuansa karitatif daripada produktivitas perlu dikoreksi. Program pemberdayaan demikian membuat masyarakat tidak terdorong untuk berusaha lebih keras dalam mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Masyarakat hanya dijadikan objek atau sasaran perubahan dan bukan sebagai subjek atau pelaku aktif bagi perubahan (Huraerah, 2013). Program pemberdayaan juga harus menjamin bahwa sarasannya memiliki kemandirian, keberlanjutan (*sustainability*), berdaya serta memiliki ketahanan setelah menerima berbagai program pemberdayaan tersebut. Jangan sampai program pemberdayaan yang telah diberikan kepada masyarakat tidak efektif, tidak berkelanjutan atau bahkan terhenti karena berbagai faktor (Sitepu, 2016).

Persoalan lain adalah munculnya *inequality* atau ketidaksetaraan seperti *income inequality* (Nugraha et al., 2020; Wicaksono et al., 2019) f *education inequality* (Harahap, et al., 2019). Ketidaksetaraan sering dikaitkan dengan masalah diskriminasi, eksploitasi dan penindasan, akses yang berbeda kepada sumber daya dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif dan untuk melawan mereka yang menindas (Hall & Midgley, 2012). Akibatnya, masyarakat miskin terhalang secara struktural untuk mengakses pembangunan serta sumber-sumber ekonomi secara memadai untuk mencapai tujuan dan harapan mereka.

Memaksimalkan setiap kebijakan pemerintah perlu terus memperbaiki pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Kebijakan sosial dalam pengentasan kemiskinan tersebut dapat memberikan *output* yang diharapkan oleh masyarakat serta menjamin ketahanan dan keberlanjutan hidup mereka tanpa melupakan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, determinasi diri dan sebagainya. Upaya mendukung pemerintah tersebut, penulis ingin membahas satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu *Strengths-Perspective*.

Pendekatan yang menjadi salah satu ciri khas dalam pekerjaan sosial ini memang belum umum digunakan sebagai upaya menggali kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan belum ada kerangka konseptual *Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial yang dapat digunakan sebagai salah satu *input* dalam pengembangan kebijakan sosial. Di sisi lain, analisis dan pengembangan kebijakan sosial umumnya masih didasarkan pada pendekatan yang terpusat pada permasalahan atau *Problem-*

*Based Approach*. Sangat jarang pendekatan *Strengths-Based* ini digunakan dalam pengembangan kebijakan sosial (Hill, 2008).

Pergeseran pendekatan dari *Problem-Based* ke *Strengths-Based* merupakan sebuah landasan penting dalam pekerjaan sosial. Fokus terhadap masalah dan kekurangan yang dimiliki oleh penyandang masalah dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, pendekatan *Strengths-Based* harus fokus pada kekuatan untuk meningkatkan perkembangan dan mewujudkannya perubahan positif (Saleebey et al. dalam Hill, 2008). Fokus pada kekuatan dari sasaran kebijakan, kebijakan sosial diharapkan dapat memenuhi harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh sasaran kebijakan.

*Outcome* dari pendekatan ini sejalan dengan hakikat dari sebuah kebijakan sosial. Inti dari kebijakan sosial ada pada kesejahteraan sosial yaitu berhubungan dengan praktik atau pembelajaran prinsip-prinsip kesejahteraan sosial ataupun sistem kesejahteraan dalam suatu negara atau pemerintahan (Walsh et al., 2000). Sementara *Strengths-Perspective* mencoba menggali kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh sasaran kebijakan untuk menghasilkan pemberdayaan, ketahanan, kemandirian serta keberlanjutan bagi setiap sasaran kebijakan.

Tulisan ini disusun dengan berbasis pada kajian literatur atau dokumen. Seperti buku-buku, artikel, ataupun jenis tulisan ilmiah lainnya yang terpercaya. Literatur tersebut akan membantu penulis mengupas karakteristik dari *Strengths-Perspektif* dalam pengembangan kebijakan sosial. Penulis juga akan mendasarkan argumentasinya pada kajian-kajian sebelumnya yang terkait dengan pendekatan *strengths-based* dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan dan *inequality* masih menjadi isu sentral baik dalam pembangunan maupun kebijakan sosial pengentasan kemiskinan. Meskipun pembangunan memang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, pembangunan tidak memiliki arti jika tidak meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan semua orang (Hall & Midgley, 2012). Kondisi di Indonesia juga serupa karena pembangunan belum menjamin kesejahteraan semua warga negara. Satu diantara sekian sebabnya yaitu upaya pengentasan kemiskinan belum memberikan hasil yang maksimal (Djumiarti, 2010). Jumlah orang miskin memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data terakhir menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta orang pada September 2019 (BPS, 2020).

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia difokuskan pada dua bidang besar yaitu; pengurangan beban hidup masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan. Pengurangan beban hidup dilakukan dengan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

Bila dilihat dalam paradigma proses, program pengurangan beban merupakan program dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sedangkan program pemberdayaan merupakan upaya berkelanjutan untuk membuat masyarakat miskin menjadi mandiri dan berdaya. Melalui usaha mandiri, masyarakat miskin diharapkan dapat

mengembangkan kekuatan, potensi serta sumber daya yang mereka miliki setelah dibantu oleh stimulus dari pemerintah. Program pemberdayaan ini menjadi titik penting dimana masyarakat miskin berpotensi untuk keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan harus didesain dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga membantu masyarakat miskin untuk keluar dari situasi kemiskinan.

Beberapa program pemberdayaan yang terkesan karitatif serta memperlakukan sasarannya sebagai objek harus didesain sedemikian rupa. Desain atau pengembangan program pemberdayaan tersebut dapat menggunakan kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* sebagaimana akan dijelaskan di bawah. Memahami kemiskinan dari pendekatan kekuatan akan mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang dimiliki oleh orang miskin. Jika pemahaman ini digunakan dalam pengentasan kemiskinan, maka pendekatan dan cara berpikir dalam menentukan kebijakan maupun program pengentasan kemiskinan akan berbeda pula. Perbedaan ini terjadi karena dengan menggunakan pendekatan kekuatan, arah dari penyusunan kebijakan maupun program adalah mendayagunakan kekuatan atau sumber daya orang miskin, bukan mengatasi kelemahan atau kekurangan orang miskin (Ishartono et al., 2017).

### ***Strengths-Perspective* dalam Pengembangan Kebijakan Sosial**

Secara konseptual, pendekatan *Strengths-Based* berkembang sejak awal tahun 90-an dan menjadi pendekatan yang sering digunakan oleh para profesional untuk menolong klien dengan permasalahan kesehatan, keluarga dan mental (Weick et al., dalam Yip, 2008). Pendekatan ini dimulai dengan adanya kesadaran akan keterbatasan dari

orientasi kepada penyakit dalam intervensi dan layanan. Selanjutnya muncul penegasan akan eksplorasi, penilaian dan pengembangan kekuatan dan kemampuan klien untuk sembuh dalam proses intervensi (Yip, 2008).

Pendekatan ini sudah sejak lama digunakan dalam praktik pekerjaan sosial dalam intervensi terhadap individu, kelompok atau komunitas (Hill, 2008). Asumsi dasar pendekatan ini antara lain semua orang memiliki kekuatan dan kapasitas, mereka bisa berubah dan bertumbuh melalui kekuatan dan kapasitas mereka (Pulla, 2017). Perkembangannya, beberapa ahli pekerjaan sosial melihat nilai positif di atas relevan dalam pengembangan kebijakan. Mulai memanfaatkan dalam analisis kebijakan sosial pengentasan kemiskinan untuk menghasilkan kebijakan sosial yang lebih efektif. Mereka meyakini bahwa fokus yang lebih besar terhadap kekuatan dan sumber daya pada diri individu seharusnya dapat diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan sosial (Chapin, 2011).

Latar belakang munculnya pendekatan *Strengths-Based* adalah adanya penggunaan pendekatan *Problem-Based* yang tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan individu, keluarga, dan komunitas secara tuntas. Demikian juga dalam pengembangan kebijakan sosial, pendekatan *problem-based* dalam analisis dan penyusunan kebijakan sosial hanya berfokus pada permasalahan dan menggunakan pendekatan patologis (Chapin, 1995). Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari sebuah kebijakan sosial sebagai jawaban segera terhadap suatu permasalahan sosial. Salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk penyelesaian masalah secara langsung adalah bantuan sosial. Bantuan tersebut dapat menyelesaikan persoalan dengan segera. Namun, di sisi lain bantuan langsung tersebut dapat memunculkan suatu ketergantungan terus

menerus jika pelaksanaannya tidak diarahkan dengan baik (Putera, 2007).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pendekatan *problem-based* efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, pendekatan *problem-based* dipandang belum maksimal dalam menghasilkan perubahan perilaku ke arah kemandirian, *sustainability*, keberdayaan.

Tetapi sebaliknya menumbuhkan ketergantungan terhadap sumber-sumber di luar diri individu secara terus menerus (Ellis dan Weekse dalam Ishartono et al., 2017). Sebuah kebijakan sosial memiliki visi dan misi perubahan yang harus dialami oleh setiap sarannya. Sehingga, untuk mewujudkan perubahan tersebut, dibutuhkan penguatan kebijakan sosial melalui adanya *Strengths-Perspective*.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan *Problem Based* dan Pendekatan *Strengths-Based* dalam Pengembangan Kebijakan

<b>Pendekatan <i>Problem-Based</i></b>	<b>Pendekatan <i>Strengths-Based</i></b>
Definisi Masalah	Identifikasi kebutuhan dasar dan tantangan-tantangan dalam memenuhi kebutuhan Negosiasi definisi
Analisis masalah: Sebab Akibat	Identifikasi bagaimana hambatan diatasi oleh klien dan melalui program-program ( <i>best practice</i> )
Menginformasikan kepada publik	
Pengembangan tujuan kebijakan	Identifikasi peluang dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka Perumusan kebijakan
Membangun kesepakatan	Negosiasi kesepakatan tentang tujuan kebijakan
Desain program	Desain program
Implementasi	Implementasi
Evaluasi dan penilaian	Evaluasi dan penilaian hal-hal yang dicapai oleh klien

Sumber: Chapin, 1995

Konteks pengembangan kebijakan, pendekatan ini mengubah paradigma atau cara berpikir dimana sebelumnya kebijakan sosial diarahkan untuk menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan penyandang masalah sosial ke paradigma baru yang memandang penyandang masalah sosial memiliki potensi atau kekuatan dalam diri mereka untuk bangkit dan keluar dari masalah mereka. Paradigma baru

ini melibatkan penyandang masalah karena mereka memiliki kekuatan untuk memahami masalahnya serta menemukan solusi yang tepat.

Fokus dari pendekatan ini ada pada kekuatan, bukan pada masalah (Ishartono et al., 2017).

## Mengapa *Strengths-Perspective*?

Jika pendekatan berbasis masalah memfokuskan perhatian dan intervensinya pada masalah, maka pendekatan berbasis kekuatan secara filosofis menempatkan tujuan-tujuan, kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu sebagai fokus sentral dalam proses pertolongan (Saleebey dalam Chapin, 2011). Pendekatan berbasis kekuatan dalam praktik pekerjaan sosial berusaha mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah dan lingkungannya agar dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka (Saleebey dalam Rapp et al., 2006).

Pendekatan berbasis kekuatan “memperkuat” kekuatan dalam komunitas, dan mendorong transfer kekuatan-kekuatan itu ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan sehingga tidak mengisolasi daerah yang lemah. Selain itu, kekuatan yang sudah dimiliki oleh suatu komunitas diakui dan didayagunakan untuk mengatasi permasalahannya (Rappaport, et al., dalam Hill, 2008). Perspektif ini juga memiliki kaitan erat dengan pemberdayaan karena penekanannya pada kemampuan, ketertarikan, aspirasi, sumber daya, keyakinan dan prestasi yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan dan kekuatan tersebut yang nantinya akan didayagunakan dalam rangka mengatasi permasalahan serta mengejar perubahan positif (Sheafor dan Horejsi dalam Zastrow & Kirst-Ashman, 2007).

Rapp (dalam Hill, 2008) menyatakan bahwa “kerangka kebijakan berbasis kekuatan tidak mengabaikan ‘masalah’ atau peristiwa negatif di sekitar individu atau komunitas, tetapi memilih untuk fokus pada apa yang mencegah hambatan ini. Pendekatan ini juga mempelajari cara untuk menggunakan sumber daya dan kapasitas yang ada dari seseorang atau lingkungan secara lebih penuh untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang mereka alami. Pendekatan *Strengths-Based* dalam kebijakan sosial juga memberi penghargaan untuk setiap prestasi dan keberhasilan; bukan sekedar memberi hukuman terhadap kegagalan. Program dan layanan yang berhasil membantu target penerima manfaat mencapai tujuan yang diinginkan harus dihargai. Fokus kesuksesan juga berada pada penyedia layanan dan sistem sosial, tidak hanya pada kelompok atau individu sasaran.

Secara singkat, kebijakan sosial yang *Strengths-Based* berarti menjamin berbagai dimensinya terkandung di dalamnya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas dan efisiensi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dimensi-dimensi di atas harus dimiliki oleh setiap sasaran sebagai sebuah keberhasilan dari kebijakan sosial. Dimensi-dimensi tersebut sesuai dengan nilai dasar yang dimiliki oleh *Strengths-Perspective* sebagaimana disebutkan oleh Saleebey seperti keterlibatan (*involvement/ membership*), kemandirian (*self-determination*) serta pemberdayaan (*empowerment*) (Saleebey, 2000).

## Karakteristik *Strengths-Perspective* dalam Pengembangan Kebijakan

Menggunakan pendekatan *Strengths-Based* dalam pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, para *stakeholder* kebijakan setidaknya perlu memahami kerangka *Strengths-Perspective*. Rapp, Pettus dan Goscha mengembangkan kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* dimana didalamnya terkandung prinsip-prinsip *Strengths-Perspective* (Rapp et al., 2006).

Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial yang dikembangkan hendaknya kongruen atau sejalan dengan

pengalaman atau agenda serta tujuan yang ingin dicapai oleh sasaran kebijakan. Hal ini bisa dilaksanakan melalui analisis dan definisi masalah sosial yang melibatkan sasaran kebijakan sehingga masalah sosial yang menjadi publik serta masalah kebijakan menggambarkan aspirasi yang ingin disuarakan oleh sasaran kebijakan. Pelibatan sasaran kebijakan yang sangat luas dapat menggunakan mekanisme seperti perwakilan sehingga dapat membuat proses pelibatan masyarakat luas menjadi mudah dan efektif.

2. Memosisikan masalah sesuai dengan tempatnya. Sebelum sebuah masalah sosial didefinisikan, analisis masalah sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejauh mana masalah sosial tersebut berkaitan dengan masalah sosial yang lain karena satu masalah sosial memiliki interdependensi dengan masalah sosial yang lain. Selain itu, masalah sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sasaran kebijakan. Namun sesuatu yang menjadi penghalang bagi sasaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan.
3. Keanggotaan yang sama serta persepsi positif terhadap sasaran kebijakan. Kebijakan sosial mengutamakan prinsip *equality*, yaitu kesamaan baik akses terhadap sumber daya, akses terhadap pilihan, kesempatan maupun lokasi. Manfaat dari kebijakan sosial harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga sumber daya atau peluang didapatkan oleh sasaran kebijakan sesuai dengan harapan dan tujuannya (Gilbert & Terrell, 2013). Penekanan pada *equality* dalam rangka menurunkan angka kemiskinan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan dalam pembangunan diharapkan dapat

menurunkan *gap* antara orang miskin dan orang kaya untuk menurunkan *income inequality* (Nugraha et al., 2020). Sedangkan persepsi positif berarti memandang sasaran kebijakan sebagai entitas yang telah memiliki kekuatan, potensi serta sumber daya yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, sebuah kebijakan sosial tidak menciptakan sumber daya baru yang terpisah atau tersegregasi.

4. Bersifat sukarela bagi setiap sasarannya berarti sebuah kebijakan sosial tidak memaksa sasarannya untuk mengakses manfaat yang diberikan. Pilihan diserahkan kepada kehendak bebas dari sasarannya sejauh mana mereka menilai bahwa pilihan mereka membantu mereka untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Pilihan yang tersedia harus memberikan manfaat yang maksimal bagi sasaran kebijakan.
5. Struktur insentif menjamin keberlangsungan dan kecukupan dari sebuah kebijakan untuk memberikan *outcome* yang maksimal kepada sasarannya. Kecukupan mengacu pada pemberian standar kesejahteraan yang layak, terlepas dari kekhawatiran apakah alokasi manfaat sama atau dibedakan bagi setiap sasarannya (Gilbert & Terrell, 2013). Struktur insentif dibuat dengan pengukuran yang jelas tentang batas *outcome* yang akan dicapai oleh sasaran kebijakan dengan mengakses kebijakan tersebut.

### **Implikasi dalam Pengembangan Kebijakan**

Implementasi kerangka kebijakan sosial yang *Strengths-Based* dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia akan menghasilkan beberapa implikasi. Implikasi tersebut didasarkan pada tulisan Hill yang mengelaborasi pandangan dari beberapa ahli tentang *Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial (Hill, 2008). Penulis mencoba melihat implikasinya

dalam pengembangan kebijakan sosial penanganan kemiskinan di Indonesia. Implikasi tersebut antara lain:

1. Pemerintah melibatkan seluruh “*stakeholder* kemiskinan” dalam menjaring masukan. Termasuk masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan. Pelibatan tersebut dalam tahap awal penyusunan kebijakan seperti mendefinisikan kekuatan, kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, merekonseptualisasikan masalah sosial, serta meyakinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari sasaran kebijakan (Chapin, 2011).
2. Perlu menjalin hubungan emosional antara pembuat kebijakan dengan masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan. Hubungan emosional menjamin pembuat kebijakan berempati terhadap apa yang dialami oleh masyarakat miskin sehingga kebijakan yang disusun benar-benar berlandaskan pada perspektif hambatan yang dialami oleh sasaran kebijakan. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh diskriminasi dan eksklusi dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi bahkan karena karakteristik demografi seperti ras, gender dan status sosial ekonomi (Chapin, 2011).
3. Dalam memahami konsep masyarakat miskin sebagai penyandang masalah, penyusun kebijakan tidak lagi melihat masyarakat miskin semata-mata sebagai sumber masalah tapi sebagai sumber kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki masyarakat miskin dan komunitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan

hambatan serta menciptakan kesempatan (Chapin, 2011).

4. Kebijakan harus bersifat “spesifik lokasi” karena masalah kemiskinan di suatu lokasi berbeda dengan di lokasi yang lain. Prinsip *equality* menjamin bahwa manfaat dari kebijakan harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin *equality* dalam distribusi sumber daya dan peluang.
5. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus menghormati masyarakat miskin sebagai sasaran. Artinya, masyarakat miskin diberi kebebasan untuk memilih layanan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan mereka. Masyarakat juga bebas dalam mendayagunakan potensi yang mereka miliki untuk mengatasi persoalan yang mereka alami.
6. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus memperlakukan kelompok sasarannya secara adil dan setara. Hal ini akan mencegah terjadinya diskriminasi serta eksklusi dalam distribusi manfaat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan.
7. Langkah jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan tidak hanya untuk mengatasi persoalan jangka pendek sehingga persoalan menjadi selesai dan tidak muncul lagi di kemudian hari. Persoalan jangka panjang seperti ketahanan (*resilience*) atau keberlanjutan (*sustainability*) dari sasaran kebijakan harus mendapat perhatian penting.
8. Mengevaluasi kebijakan, pendekatan yang muncul adalah yang berasal dari kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin. Dengan demikian, evaluasi mencerminkan apa yang sesungguhnya telah dirasakan serta apa yang menjadi harapan masyarakat miskin kedepannya. Evaluasi kebijakan bukan merupakan hasil pengamatan atau penilaian dari penyusun kebijakan.

9. Apresiasi harus diberikan kepada kebijakan serta program atau layanan yang terbukti sukses menjawab apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dan menyelesaikan masalah kemiskinan yang mereka hadapi.

Implikasi pendekatan *Strengths-Based* di atas bersifat inklusif karena mendorong partisipasi dalam membentuk kebijakan sosial. Selain itu, aspek-aspek tersebut mendorong adanya perubahan dalam kebijakan dan legislasi untuk meningkatkan kondisi sosial serta mempromosikan keadilan sosial (Rapp et al., 2006). Implikasi di atas juga menunjukkan sebuah paradigma baru bagi kita. Bila sebelumnya fokus kebijakan yang dihasilkan adalah mengatasi kelemahan dan kekurangan orang miskin, melalui pendekatan *Strengths-Based*, kemiskinan dipahami dari pendekatan kekuatan untuk mendapatkan gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh orang miskin. Paradigma baru tersebut akan mempengaruhi dan menentukan kebijakan maupun program pengentasan kemiskinan.

### Tantangan Dalam Implementasi

Implementasi pendekatan *Strengths-Based*, harus diakui bahwa terdapat kesulitan dan tantangan.

Identifikasi beberapa tantangannya sebagai berikut (Hill, 2008):

1. Melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan bukanlah hal yang mudah. *Stakeholder* yang tidak berpengalaman dalam proses penyusunan kebijakan mungkin akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi. Kemudian, perbedaan sudut pandang juga bisa memperumit pembahasan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
2. Sebagai sebuah pendekatan baru yang berwawasan keterbukaan dan kolaborasi, bisa jadi akan menimbulkan penolakan

karena keluar dari apa yang telah menjadi kebiasaan lama dalam penyusunan suatu kebijakan.

3. Pendekatan ini menuntut setiap pihak untuk mengorbankan apa yang telah mereka miliki untuk disumbangkan dalam penyusunan kebijakan. Hal ini mungkin sulit terjadi karena pihak-pihak tersebut tidak akan maksimal dalam mengupayakan sesuatu yang belum tentu akan berhasil.
4. Kebijakan biasanya dipahami sebagai upaya langsung atau respon cepat terhadap suatu permasalahan. Pendekatan ini berfokus pada perubahan yang berkelanjutan, jangka panjang dan multi generasi. Oleh karena itu, pendekatan ini bisa dianggap mahal, tidak efektif, dan tidak cepat tanggap.
5. Akhirnya, pendekatan ini bisa menimbulkan sikap skeptis karena terkesan sebagai suatu permainan bahasa tanpa ada perubahan berarti. Ada beberapa aspek dari pendekatan ini yang mungkin akan dilihat sebelah mata oleh sebagian orang karena pendekatan ini tidak dikenal secara umum.

Terlepas dari beberapa hambatan di atas, *Strengths-Perspective* menawarkan beberapa nilai positif dalam pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Beberapa nilai positif dan baru yang bisa diambil antara lain;

1. Menghindarkan kita dari sikap “*victim blaming*”,
2. Merefleksikan nilai-nilai dalam pekerjaan sosial untuk dikampanyekan secara luas,
3. Menawarkan kebaruan dalam ide, dan
4. Melibatkan sasaran kebijakan secara tepat dalam pengembangan kebijakan (Chapin, 2011).

Sebagai sebuah paradigma baru *Strengths-Perspective* tidak dituntut untuk diterapkan secara penuh dalam waktu yang

singkat. Dibutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan setidaknya untuk membiasakan diri untuk mengaplikasikan nilai-nilai pendekatan ini dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## PENUTUP

*Strengths-Perspective* dalam pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang telah berkembang sejak lama terutama dalam intervensi terhadap individu, keluarga dan komunitas. Sedangkan *Strengths-Perspective* sebagai sebuah kerangka konseptual dalam pengembangan kebijakan sosial merupakan hal yang baru. Meskipun memiliki latar belakang dalam praktik pekerjaan sosial, pendekatan ini layak dan feasible untuk diaplikasikan dalam pengembangan kebijakan sosial. Pekerjaan sosial memiliki misi untuk mengupayakan determinasi diri serta keadilan sosial bagi kliennya (NASW dalam Chapin, 2011). Demikian juga dalam ruang lingkup yang lebih luas, praktik kebijakan dalam pekerjaan sosial mengupayakan terwujudnya kebijakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial serta determinasi diri bagi sasarannya. *Strengths-Perspective* menjadi upaya pekerjaan sosial dalam menginkorporasikan nilai-nilai pekerjaan sosial untuk mempengaruhi pengembangan kebijakan serta menempatkan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam tindakan/aksi (Chapin, 2011).

*Strengths-Perspective* dalam pengembangan kebijakan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif. *Strengths-Perspective* dapat memperkuat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada nilai tambah yang ingin ditawarkan oleh pendekatan ini dalam pengembangan kebijakan sosial. Nilai-nilai tersebut antara lain penghargaan terhadap potensi dan kekuatan penyandang masalah sosial, keberlanjutan jangka panjang akan setiap

program yang dibuat pemerintah, keterbukaan dan kolaborasi dalam penyusunan kebijakan serta perubahan nyata yang dialami oleh sasaran kebijakan. Selain itu, pendekatan ini dapat memperkuat *outcome* yang akan dihasilkan oleh sebuah kebijakan sosial seperti kemandirian, keberdayaan, ketahanan, keberlanjutan dan sebagainya.

Sisi lain, *Strengths-Perspective* tidak menihilkan permasalahan yang dialami oleh sasaran kebijakan. Permasalahan merupakan sesuatu yang riil yang tetap harus diselesaikan. Namun, *stakeholder* kebijakan sosial hendaknya tidak berhenti sampai di situ. Menjadi pilihan terbaik bagi *stakeholder* kebijakan sosial untuk melihat kerangka *Strengths-Perspective* sebagai salah satu metode analisis dari sekian banyak metode, bukan sekedar mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Hill, 2008). *Strengths-Perspective* dapat mengisi kekosongan dalam rangka penguatan pengembangan kebijakan sosial dan tidak mengklaim bahwa kerangka pengembangan kebijakan yang lain harus ditinggalkan (Chapin, 2011).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Statistik*, No. 08/01/Th. XXIII, 15 Januari 2020.
- Chambers, D. E., & Wedel, K. R. (2005). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst* (3rd ed.). Pearson Education.
- Chapin, R. K. (1995). Social Policy Development: The Strengths Perspective. *Social Work*, 40 (4), 506–514. <https://doi.org/10.1093/sw/40.4.506>
- Chapin, R. K. (2011). *Social Policy for Effective Practice: A Strengths Approach* (2nd ed.). Routledge.

- Djumiarti, T. (2010). Strategi Pengentasan Kemiskinan : Potret Keberhasilan Pembangunan. *Dialogue (Paris)*, 2(3), 884–897.
- Gilbert, N., & Terrell, P. (2013). *Dimensions of Social Welfare Policy* (8th ed.). Pearson Education.
- Hall, A., & Midgley, J. (2012). Social Policy for Development. In *Social Policy for Development*.  
<https://doi.org/10.4135/9781446219973>
- Harahap, E. S., Maipita, I., & Rahmadana, M. F. (2019). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. *BIRCI-Journal*, 3(2), 1067–1082.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.9371067>
- Hill, K. (2008). A Strengths-Based Framework for Social Policy: Barriers and Possibilities. *Journal of Policy Practice*, 7(2–3), 106–121.  
<https://doi.org/10.1080/15588740801937920>
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–13.
- Ishartono, I., Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2017). Potret Orang Miskin Dari Perspektif Kekuatan. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 46–53.  
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13816>
- Midgley, J., Tracy, M. B., & Livermore, M. (2000). *The Handbook of Social Policy*. SAGE Publication.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The Role of Infrastructure in Economic Growth and Income Inequality in Indonesia. *Economics & Sociology*, 13(1), 102–115.  
<https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/7>
- Pulla, V. (2017). Strengths-based approach in Social Work: A Distinct Ethical Advantage. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 3(2), 97–114.
- Putera, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Demokrasi*, VI(1), 37–57.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.  
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rapp, C. A., Pettus, C. A., & Goscha, R. J. (2006). Principles of Strengths-Based Policy. *Journal of Policy Practice*, 5(4), 3–18.  
[https://doi.org/10.1300/J508v05n04\\_02](https://doi.org/10.1300/J508v05n04_02)
- Saleebey, D. (2000). Power in The People: Strengths and Hope. *Social Work*, 1(2), 127–136.
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Informa*, 2 (1), 53–68.
- Spicker, P. (2014). *Social Policy: Theory and Practice*. Policy Press.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung; Alfabeta.
- Walsh, M., Stephens, P., & Moore, S. (2000). *Social Policy and Welfare*. Stanley Thornes.
- Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2019). The Source of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Decomposition. In B. Huang, P. J. Morgan, & N. Yoshino (Eds.), *Demystifying Rising Inequality in Asia* (pp. 260–272). Asian

Development Bank Institute.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.

Yip, K. (2008). *Strengths-based Perspective in Working with Clients with Mental Illness: A Chinese Cultural Articulation*. Nova Science Publisher.

Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (12th ed.). Cengage Learning WCN

Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2007). *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (7th ed.). Brooks/Cole.